

JKMP (JURNAL KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK), 5 (2), September 2017, 217-228

ISSN 2338-445X (print), ISSN 2527-9246 (online)

Link Jurnal: <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp>

Link DOI: <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i2.1314>

DOI Artikel: 10.21070/jkmp.v5i2.1314

Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Candi

Yunita Farah Monica

Luluk Fauziah

(Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jalan Mojopahit 666 B Sidoarjo, Email:
yunitafarah44@gmail.com, lulukfauz@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, serta kendala partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni *key* informan dan enam informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait yaitu tokoh masyarakat khususnya perempuan, kepala desa, aparat desa, BPD. Hasil dari penelitian ini yaitu partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Jambangan cukup besar, meskipun di dalam pemerintah desa tidak ada anggota perempuannya. Bentuk partisipasi yang dapat diberikan yakni berupa pikiran, dana, tenaga, kas swadaya dan sebagainya. Termasuk juga dalam kegiatan pembangunan fisik, kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Sedangkan pada evaluasi dan pemantauan pembangunan desa partisipasi dan keterlibatan perempuan belum maksimal, meskipun di desa Jambangan telah memiliki sarana pengaduan pada masing-masing wilayah namun sampai saat ini saran dan kritik dari perempuan masih kurang. Kendala partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa Jambangan diantaranya waktu, dana dan pengetahuan dari perempuan itu sendiri mengenai partisipasi dalam pembangunan di desa Jambangan.

Kata kunci: partisipasi, partisipasi perempuan, pembangunan desa

Abstract

This study aimed to describe women's participation in rural development and constraints of women's participation in rural development in Jambangan Village, Candi District, Sidoarjo Regency. This research used descriptive qualitative research method. The data used came from primary and secondary data. Informants were categorized into two that were key informant and informant. The techniques of data collection were observation, documentation and interview toward related parties; that were public figures community, especially women, village head, apparatuses and BPD. The result was the woman's participation and involvement in planning and implementation of development in Jambangan were substantial even though there were no women in the organizational structure. The form of woman's participation were mind, fund, vitality, self-help, etc. The participation included physical development, social activities, economics and religious. In evaluating and monitoring rural development, woman's participation and involvement were not maximal yet even they had a means of complain in each sub region but until the day suggestion and critics were deficient. The obstacles of woman's participation were time, fund, and self-knowledge of the woman.

Key words: participation, women's participation, rural development

Pendahuluan

Dalam terselenggaranya pembangunan di wilayah desa tidaklah lepas dari peran penting partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang didasarkan atas keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam dirinya sendiri, sehingga memungkinkan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap daerahnya sendiri. Agar upaya pembangunan desa dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang dicita-citakan maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Oleh karena hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan (Syahrul, 2014).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa dampak positif bagi pembangunan desa untuk lebih partisipatif. (Solekhan, 2014:24) Terkait dengan partisipasi, partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama di pedesaan membuat pandangan yang berbeda mengingat bahwa budaya telah membentuk persepsi dan pola pikir masyarakat dalam menempatkan posisi perempuan itu sendiri di lingkungan sosialnya. Meskipun kaum perempuan

merupakan potensi sumber daya manusia yang sama dengan laki-laki, namun kenyataannya di Indonesia menunjukkan dominannya partisipasi laki-laki dari pada perempuan.

Berdasarkan pengamatan awal menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Sidoarjo adalah 1.029.010 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 1.020.028. Di Kecamatan Candi, jumlah penduduk laki-laki adalah 81.200 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 81.695 orang. Jumlah perbandingan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sidoarjo seimbang, bahkan di Kecamatan Candi penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Realita yang terjadi jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah partisipasi perempuan didalam hal pembangunan, terutama di pedesaan (Sidoarjo Dalam Angka, 2013).

Data di desa Jambangan tahun 2016 menunjukkan jumlah laki-laki adalah 1.524 orang dan jumlah perempuan adalah 1.768 orang. Dari data tersebut terlihat jumlah perempuan lebih banyak dari pada jumlah laki-laki. Namun pada kenyataannya perempuan tidak mendominasi dalam hal partisipasi perencanaan pembangunan. Hal tersebut diperkuat oleh masyarakat desa Jambangan yang mengatakan bahwa partisipasi perempuan di desa Jambangan masih kurang dilihat dari partisipasi perempuan dalam hal musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) tahun pelaksanaan Januari tahun 2016 mengundang masyarakat khususnya perempuan sebanyak 20 orang namun pada pelaksanaannya yang hadir hanya 5 orang. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo? Serta bagaimana kendala partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo? Sedangkan, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo serta mendiskripsikan kendala partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Landasan Teoretis

Partisipasi

Partisipasi menurut (Adi,2007; Abadi,2014) merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian potensi dan masalah yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dari beberapa

pakar yang mengemukakan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program atau proyek pembangunan, yaitu partisipasi harta benda, partisipasi sosial, partisipasi uang, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Bentuk partisipasi yang nyata contohnya tenaga, keterampilan, dan uang, harta benda, sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi pengambilan keputusan, partisipasi sosial, partisipasi representatif, dan buah pikiran. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas (Putri, 2012: 21).

Pembangunan

Siagian (1983) mengungkapkan bahwa pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Dari pendapat tersebut dapat dibedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya.

Untuk dapat memperkembangkan perubahan-perubahan itu ke arah keadaan yang dianggap lebih baik, seringkali perlu dipergunakan cara yang berencana. Diusahakan suatu kombinasi kegiatan-kegiatan yang diharapkan memperoleh hasil terbaik, penetapan prioritas mana yang perlu didahulukan, yang diharapkan akan memberikan efek dongkrak bagi pertumbuhan. Kesemuanya itu adalah pembangunan nasional secara berencana, adapun tingkatan-tingkatan kegiatan di dalam pembangunan nasional berencana yang dilakukan secara terus menerus dan merupakan satu proses menurut (Tjokroamidjojo, 1990) yaitu:

1. Adanya keinginan-keinginan dasar di dalam masyarakat yang menuntut pemuasan. Sumber-sumber dari keinginan-keinginan ini adalah kebutuhan dasar yang dirasakan.
 2. Perumusan konsiliasi dilakukan dalam proses politik dan dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan politik mengenai kehendak-kehendak negara.
-

3. Perumusan dasar-dasar hukum bagi pelaksanaan keputusan politik. Hal ini penting bagi suatu negara hukum.
4. Perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pemerintah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di dalam keputusan politik.
5. Penyusunan program-program kerja, sistem, dan mekanisme pelaksanaan.
6. Implementasi untuk merealisasikan pencapaian tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana atau kebijaksanaan dan program-program pemerintah yang konsisten berdasar keputusan-keputusan politik.
7. Penilaian dari pelaksanaan (monitoring) maupun dari hasil-hasil yang dicapai (evaluasi).

Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender atau biasa disingkat dengan PUG merupakan strategi yang dicanangkan secara sistematis dan rasional untuk mewujudkan dan mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti rumah tangga, masyarakat dan negara. Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan kebutuhan, aspirasi, pengalaman dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Tujuan PUG dalam inpres tersebut adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pemantauan
4. Evaluasi

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2009:8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Lokasi penelitian dipilih didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut lokasi penelitian letaknya terjangkau oleh

kemampuan peneliti. Dan dapat memperoleh data secara mudah, lengkap dan mendalam dari objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah penentuan informan. Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni *key* informan dan informan. *Key* informan yaitu kepala Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya untuk informan berasal dari tokoh masyarakat khususnya perempuan di Desa Jambangan, aparatur Desa Jambangan, BPD Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu peringkasan data, penyajian data, pembahasan data dan merumuskan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Partisipasi menurut (Adi, 2007; Abadi, 2014) merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian potensi dan masalah yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Sedangkan perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta-fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan yang ingin dikehendaki atau yang diharapkan (Riyadi, 2005:3).

Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) di desa Jambangan telah dilaksanakan pada akhir tahun 2016, sedangkan untuk perencanaan APBDes telah dilakukan juga pada tanggal 17 Maret 2017. Yang hadir dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ada dua orang perempuan, lima orang laki-laki sesuai dengan ketentuan 30% dari jumlah BPD adalah perempuan. Pernyataan tersebut di tegaskan oleh Bapak Sukisno selaku Ketua BPD “Banyak yang datang perempuannya pada saat Musrenbangdes. Yang hadir dari unsur ibu-ibu PKK, tokoh masyarakat perempuan, Fattayat pengajian. Cara penyampaianya usulan-usulan perempuan dilakukan secara langsung di forum musrenbangdes, mengenai kegiatan dari organisasi masing-masing, menyampaikan pendapat untuk UKM, Bumdes, dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan oraganisasinya (PNPM, PKK, Pengajian).” (Sumber: Wawancara dengan Sukisno, Ketua BPD, 13 Mei 2017)

Di pemerintah desa pada saat ini belum ada aparat desa perempuan karena pada saat pemilihan selalu yang terpilih laki-laki. Dan yang diundang dalam

Musrenbangdes yakni pemangku kepentingan kalau perempuan seperti ketua PKK, ketua kotak (PNPM), ketua muslimat. Kemudian untuk cara partisipasi dalam penyampaian pendapat atau usulan perempuan biasanya melalui RT dulu, RW, BPD, baru ke desa dalam rapat Musrenbang. Usulan-usulan mereka ditampung dan diajukan pada saat Musrenbang dan dipilih lagi saat APBDes. Cara masyarakat perempuan menyampaikan melalui perwakilan ormas masing-masing, kemudian disampaikan oleh perwakilan ormas didalam Musrenbangdes. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan di desa Jambangan khususnya pada saat Musrenbangdes cukup banyak yang hadir dan memahami informasi-informasi yang telah diberikan meskipun belum maksimal dalam perencanaan pembangunan karna ada pula perempuan yang tidak bisa hadir dalam Musrenbang meskipun telah diundang oleh pemerintah desa.

Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program atau proyek pembangunan, yaitu partisipasi harta benda, partisipasi sosial, partisipasi uang, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Bentuk partisipasi yang nyata contohnya tenaga, keterampilan, dan uang, harta benda. (Putri, 2012: 21).

Pada pelaksanaan pembangunan atau kegiatan di desa Jambangan perempuan selalu ikut serta membantu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Ahmad Khudlari "Jika ada kegiatan desa, perempuan selalu ikut serta membantu, contohnya ada kegiatan lomba dari Kecamatan dan lain-lain pasti perempuan ikut berpartisipasi. Termasuk juga dalam kegiatan pembangunan fisik. Kontribusinya adalah tenaga, pikiran, kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan/pengajian." (Wawancara, 28 Maret 2017)

Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan di Jambangan sangat aktif dan bisa dikatakan 80% berhasil apabila pengurus pelaksanaan pembangunan di desa adalah perempuan. Didalam setiap kegiatan-kegiatan dan pembangunan di desa Jambangan partisipasi perempuan dan kontribusi perempuan yakni tenaga dan pikiran sangat besar. Contohnya sosialisasi merawat jenazah oleh ibu PKK, kegiatan lainnya, poskesdes, senam lansia yang hadir setiap bulannya kurang lebih ada delapan puluh orang lansia, yang semuanya diurus oleh perempuan. Kontribusi perempuan yang lainnya berupa dana, tenaga, kas swadaya dan sebagainya.

Partisipasi Perempuan dalam Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan Desa

Evaluasi merupakan proses yang sistematis yang mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan dan dilakukan secara berkesinambungan. Sedangkan pemantauan adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan. Kegiatan pemantauan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai.

Sarana untuk penyampaian evaluasi dan pemantauan pembangunan di desa Jambangan ada di setiap ormas masing-masing, di RT dan RW. Kritik dan saran disampaikan dari bawah dulu, jadi dari RT, RW, BPD baru ke pemerintah desa. Untuk keberlanjutannya ada dan akan segera di tindak lanjuti. Di desa Jambangan ini ada 7 (tujuh) RW dan di setiap wilayah tersebut ada sarana pengaduan, jadi apabila masyarakat ada saran bisa langsung di tampung ke wilayahnya masing-masing kemudian apabila tidak bisa ditangani di wilayah, biasanya dirapatkan di forum BPD yang diadakan tiga bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Ada banyak saran dan kritik yang biasanya di sampaikan secara langsung, namun apabila ada yang penting melalui tulisan/surat. Namun untuk saran dari perempuan itu sendiri masih kurang. Yang diperkuat dengan pendapat dari Bapak Ahmad Jaiz selaku aparat desa “Sarana untuk evaluasi dan pemantauan di desa hanya kotak aduan di setiap RT, RW, BPD, kantor desa. Namun sampai saat ini kritik dan saran perempuan mengenai evaluasi pembangunan di desa belum ada, mungkin ada di ormas masing-masing (PKK, pengajian, PNPM). Kritik dan saran biasanya di sampaikan dari bawah dulu, jadi dari RT, RW, BPD, baru ke desa. Untuk kelanjutan pasti ada dari pihak tersebut dan akan segera ditangani.” (Wawancara, 05 April 2017)

Kendala Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa

Di dalam tujuan PUG dalam inpres tersebut adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:

1. Perencanaan
-

2. Pelaksanaan
3. Pemantauan
4. Evaluasi

Namun dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender, tentu ada kendala yang dihadapi seperti halnya di desa Jambangan kendala partisipasi perempuan sebagai berikut:

1. Waktu

Waktu adalah kendala utama bagi partisipasi perempuan di desa Jambangan, karena perempuan pada dasarnya adalah ibu rumah tangga yang harus memenuhi kewajiban dirumah sebagai seorang istri bagi suaminya, dan sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Sehingga waktunya terbatas untuk mengikuti setiap kegiatan pembangunan di desa Jambangan, jadi perempuan tidak bisa ikut rapat sampai malam untuk membahas APBDes dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan di desa seperti acara atau kegiatan biasanya perempuan tidak bisa hadir pada saat pelaksanaan pembangunan di desa Jambangan.

2. Pengetahuan

Kendala yang kedua adalah pengetahuan masyarakat khususnya perempuan di desa Jambangan yang masih kurang dalam hal evaluasi dan pemantauan pembangunan, sebagian besar perempuan belum memahami peran dan partisipasinya pada saat evaluasi dan pemantauan pembangunan yang ada di desa Jambangan, meskipun sarana untuk penyampaiannya pendapat, usulan, kritik, dan saran sudah ada di setiap wilayah namun masyarakat khususnya perempuan sebagian ada yang belum faham sama sekali mengenai itu.

3. Dana

Sedangkan kendala terakhir dalam pelaksanaan pembangunan yakni mengenai dana, sehingga kadang anggota PKK menggunakan uang sendiri (swadaya) dalam pelaksanaan pembangunan, misal dalam melengkapi sarana dan prasarana diruang PKK di Balai desa Jambangan. Diperkuat juga dengan pendapat aparat desa yang mengatakan tidak ada kendala yang berarti pada saat partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa, namun untuk kendala partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan yakni terkendala dengan dana, apabila tidak ada dana tidak dapat melaksanakan pembangunan.

Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Pada partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di desa Jambangan khususnya pada saat Musrenbangdes cukup banyak yang hadir dan memahami informasi-informasi yang telah diberikan meskipun belum maksimal dalam perencanaan pembangunan karena ada pula perempuan yang tidak bisa hadir dalam Musrenbang meskipun telah diundang oleh pemerintah desa. Partisipasi dan kontribusi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan cukup besar meskipun di dalam pemerintah desa tidak ada anggota perempuannya namun di dalam pembangunan desa khususnya dalam pemberdayaan masyarakat partisipasi dan keterlibatan perempuan cukup banyak. Bentuk partisipasi yang dapat diberikan perempuan yakni berupa pikiran, dana, tenaga, kas swadaya dan sebagainya. Termasuk juga dalam kegiatan pembangunan fisik, kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Sedangkan pada partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam evaluasi dan pemantauan pembangunan belum maksimal, meskipun di desa Jambangan telah memiliki sarana pengaduan pada masing-masing wilayah namun sampai saat ini saran dan kritik dari perempuan masih kurang.
- b. Kendala partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa Jambangan diantaranya waktu, dana dan pengetahuan dari perempuan itu sendiri mengenai partisipasi dalam pembangunan di desa Jambangan.

2. Saran

- a. Bagi Pemerintah desa Jambangan diharapkan lebih bijaksana dalam memilih aparat desa tanpa membedakan jenis kelamin yang akan dijadikan pengurus dalam struktur organisasi, sehingga dalam struktur organisasi tidak lagi didominasi oleh laki-laki. Kegiatan-kegiatan yang diadakan bisa diikuti oleh semua anggota baik perempuan maupun laki-laki. Sebaiknya sarana untuk evaluasi dan pemantauan pembangunan di desa Jambangan lebih di tingkatkan lagi sehingga perempuan dapat menyalurkan aspirasinya dengan maksimal.
 - b. Sebaiknya perlu adanya pendidikan politik bagi perempuan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Sehingga perempuan dapat menyumbangkan ide dan gagasan untuk kemajuan pembangunan desa kedepannya. Pemilihan waktu yang tepat dan penambahan anggaran dana untuk perempuan dapat memunculkan partisipasi perempuan yang lebih maksimal dalam pembangunan desa Jambangan.
-

Daftar Pustaka

- Abadi, Totok W, Nunung P, Budi G. (2014). "Performance e-government untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo." dalam *Kawistara*, Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Universitas Gadjah Mada, vol.4/3, hal. 237-248
- D. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. 2000. Jakarta: Republik Indonesia.
- Lestari, A. M. (2013). *Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pemberdayaan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan*, 6.
- Mosse, J. C. (2007). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putri, R. S. (2012). *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Mutu*, 13.
- Rafif, M. E. (2013, 11 13). *Pengertian Kesetaraan dan Keadilan gender*. Retrieved 11 16, 2016, from Pengertian Kesetaraan dan Keadilan gender: <http://elvanrafif.blogspot.co.id/2013/11/kesetaraan-gender-status-sosial.html>
- Riyadi, dan Supriyadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono, P. D. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&A*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Syahrul, M. (2014, agustus minggu). *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha Pembangunan Desa*. Retrieved desember minggu, 2016, from Wawasan Pendidikan: <http://www.wawasanpendidikan.com/2014/08/peran-partisipasi-masyarakat-dalam.html>
- Tjokroamidjojo, B. (1990). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Wikipedia. (2016). *Monitoring*. Retrieved from Monitoring: <https://id.wikipedia.org/wiki/Monitoring>
-

